



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2013



DAFTAR ISI

Pajak Migas.....	1
MRT Jakarta	2
Pelebaran Jalan Joglo	3
Jembatan penghubung 3 Kabupaten.....	4



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Kemkeu Mengkaji Insentif Pajak Migas	<div><div>- Kementerian Keuangan mempertimbangkan permintaan Kementerian ESDM agar memberikan insentif pajak bagi sektor minyak dan gas .</div><div>- Langkah ini diambil karena pemerintah ingin kegiatan eksploitasi migas lebih marak agar cadangan migas bertambah</div></div>			1,6 miliar dolar AS (Estimasi)	Kementerian Keuangan	JICA siap membantu mulai dari studi kelayakan, desain, dan pembangunan konstruksi

■ INSENTIF PERPAJAKAN

Kemkeu Mengkaji Insentif Pajak Migas

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mempertimbangkan permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar memberikan insentif pajak bagi sektor minyak dan gas (migas).

Pelaksana tugas (Pit) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro bilang, secara prinsip, Kemkeu tidak keberatan jika pengenaan pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya diberlakukan bagi areal eksplorasi. "Yang menjadi subjek PBB hanyalah yang menjadi areal pengeboran. Yang tidak terpakai tidak kena pajak. Artinya, yang dikenakan hanya yang produk-

Hanya wilayah produktif yang akan dikenakan pajak bumi dan bangunan.

tif," katanya, Rabu (20/2).

Bambang melihat usulan Kementerian ESDM ini masih realistis. Sekadar catatan, selama ini, pemerintah mengenakan PBB terhadap seluruh lahan untuk kegiatan eksplorasi. Padahal, sering kali, kegiatan eksplorasi ini tidak mendatangkan hasil atau sumber minyak yang didapat kurang ekonomis untuk diproduksi dalam jumlah besar.

Aturan pajak eksplorasi migas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 15/PMK.03/2012 tentang Penatausahaan dan Pemindahtoran Pajak Bumi dan Bangun-

an Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi. Lalu Dirjen Pajak mengeluarkan aturan teknis Peraturan Ditjen Pajak No 11/PL/2012 yang memerinci, bumi yang dimaksud dalam beleid tersebut meliputi areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen dan areal pengamanan. Nah, dua aturan ini akan diperbaiki Kemkeu.

Hanya saja, Bambang belum bisa merinci kapan aturan ini akan keluar dan bisa berlaku. Ia juga tidak merinci apakah akan ada pengurangan tarif ataupun perbaikan aturan hanya kepada lahan produktif saja yang akan kena pajak bumi dan bangunan.

Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, tahun lalu, rata-rata tarif PBB di lahan untuk eksplorasi mencapai Rp 28 per meter persegi. Tarif ini lebih murah ketimbang aturan yang berlaku sebelum tahun 2012.

Dengan tarif tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) rata-rata hanya membayar PBB sebesar US\$ 1 juta per wilayah kerja. Padahal dengan aturan yang lama, mereka bisa kena kewajiban pajak hingga US\$ 20 juta per wilayah kerja eksplorasi. Dengan perbaikan peraturan ini, tentu beban jadi lebih ringan.

Langkah ini diambil lantaran pemerintah ingin kegiatan eksplorasi migas lebih marak agar cadangan migas bertambah. Sebab dalam delapan tahun terakhir, cadangan migas terus berkurang dan produksi migas juga terus melorot.

Herlina Kartika Dewi



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☒ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
MRT Jakarta Terbentur banyak Persoalan Pelik	<div>- Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum bisa memutuskan kelanjutan proyek MRT Jakarta</div> <div>- Ihwalnya, terungkap sejumlah persoalan, seperti masih terdapat penolakan dari warga, hitungan tarif dan konstruksi yang memerlukan pengkajian lebih dalam terhadap biaya investasi</div>		2017 (Target)	15,74 triliun rupiah dari pinjaman JICA	PT. MRT Jakarta	

MRT Jakarta Terbentur Banyak Persoalan Pelik

Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum bisa memutuskan kelanjutan proyek MRT Jakarta

Fahriyadi

JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga memutuskan kelanjutan nasib megaprojek *mass rapid transit* (MRT). Kemarin, uji publik angkutan massal berkecepatan tinggi yang sedianya bisa melahirkan keputusan final yang ditunggu-tunggu nyatanya berakhir antiklimaks.

Ihwalnya, terungkap sejumlah persoalan, seperti masih terdapat penolakan dari warga, hitungan tarif dan konstruksi yang memerlukan pengkajian lebih dalam lantaran berkolerasi terhadap biaya investasi.

Soal tarif MRT, Direktur PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menyebutkan, angkanya Rp 8.500 sampai Rp 15.000 per

penumpang untuk sekali jalan. Nah, perkiraan tarif sebesar itu jika ada kontribusi dari pengembangan kawasan bisnis di sekitar stasiun MRT atau *transit oriented development* (TOD).

Tanpa TOD dan subsidi pemerintah, harga tiketnya mencapai Rp 35.000-Rp 38.000 per penumpang sekali jalan. "Kalau TOD dibangun maka secara langsung bisa menekan biaya tiket ke penumpang," kata Tribudi, Rabu (20/2).

Berhubung tarif MRT mahal, tentu harus ada subsidi sehingga harganya lebih terjangkau. Makanya, PT MRT Jakarta sudah menghitung kebutuhan subsidi mencapai sekitar Rp 2,2 triliun untuk masa 20 tahun. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo setuju tiket MRT harus murah yang idealnya seperti tarif MRT di

Singapura.

Terkait nilai subsidi, Jokowi, sapaan akrab mantan Walikota Solo itu, belum punya gambaran karena nantinya tergantung hasil tender. "Tendernya sendiri belum jelas, belum dibuka," ujarnya.

Atas dasar itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyarankan konsep TOD bisa dijalankan sehingga akan menekan tarif MRT. Wakil Menteri PU Hermanto Dardak memaparkan, TOD berasal dari pendapatan pusat perbelanjaan seperti mal dan kegiatan bisnis lainnya. "Pendapatan ini bisa meringankan tarif. Jadi, rasanya TOD salah satu pilihan," terangnya.

Hermanto juga mempertimbangkan pembangunan konstruksi jalur MRT tidak di dalam tanah mengingat biaya lebih mahal, tapi mengguna-

kan jalur layang seperti monorel. "Kalau mau dibawah pasti jatuhnya mahal. Ini bisa diatasi jika TOD dipertimbangkan matang-matang," imbuhnya.

Hanya saja, rute MRT berupa jalur layang ini mendapat penolakan terutama dari warga yang tinggal di Jalan Fatmawati. "Kami sangat menyekalkan jalur MRT dibuat layang dari Senayan-Lebak Bulus. Jelas ini akan merusak tatanan wilayah," tandas Ruli

Daniel, perwakilan warga Jalan Fatmawati.

Masih banyaknya persoalan dan suara sumbang membuat Jokowi harus memutar otak lagi untuk menemukan solusi. "Saya kira perlu dibuat tim kajian evaluasi yang melibatkan masyarakat biar semua pihak menerima dan punya rasa memiliki," tegasnya.

Alhasil, warga Ibukota harus bersabar lagi karena MRT masih menjadi impian. ■

Profil Proyek MRT Jakarta

1. Pemegang konsesi	PT MRT Jakarta
2. Panjang lintasan	15,7 kilometer (km)
3. Jumlah stasiun	13 (7 layang dan 6 bawah tanah)
4. Perkiraan investasi	Rp 15,74 triliun dari pinjaman JICA
5. Perkiraan harga tiket	Rp 8.500-Rp 15.000 per penumpang
6. Perkiraan daya angkut	174.000-261.000 penumpang per hari
7. Target operasional	2017.

Sumber: PT MRT Jakarta



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☒ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pelebaran Jalan Joglo	- Proyek pelebaran jalan Joglo masih mengalami hambatan, tertahan lantaran pembayaran pembebasan tanah masih menunggu dana APBD 2013	2009	2013 (Kemungkinan)	35 miliar	Dinas PU DKI Jakarta	DimulaiKonstruksipertengahan 2013



INFRASTRUKTUR: Proyek perbaikan jalan terus dikebut untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan.

Pelebaran Jalan Joglo Tunggu APBD Cair

PELINTAS Jalan Joglo Raya belum juga bisa bernafas lega. Pasalnya, proyek pelebaran jalan sepanjang 1,4 Km dengan lebar 26 meter yang dikerjakan Dinas PU DKI Jakarta sejak 2009 lalu itu masih mengalami hambatan. Setelah sebelumnya tertunda masalah pembebasan lahan, kini tertahan kembali lantaran pembayaran pembebasan masih menunggu kucuran dana APBD 2013.

Untuk pembebasan lahan PU DKI menggelontorkan dana sebesar Rp 35 miliar. Hal itu tak lain bertujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas dari Jalan Meruya - Petukangan ke jalan Pos Pengumben dan Jalan Kebayoran Lama. Sedikitnya terdapat 130

bidang lahan dan rumah warga di RW03 yang dibebaskan.

Menurut Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Rustam Effendi mengatakan saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 65 %. Terkait keterlambatan pembayaran tersebut sebelumnya sudah dinegosiasikan dengan warga sejak akhir 2012 lalu. Warga setuju dengan harga yang ditawarkan, sesuai ketentuan NJOP senilai Rp 2,6 juta per meter² dan untuk bangunan disesuaikan dengan kondisinya, ada yang permanen, semi permanen ataupun darurat ■

► Baca **Pelebaran**...Hal 15

Sambungan dari halaman 9

"Kami cuma membebaskan lahan. Soal pembayaran menjadi kewenangan pemerintah, dan sesuai rencana saat dana APBD turun akan dibayarkan," kata Rustam kepada wartawan, kemarin (20/2).

Di lain pihak, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemkot Jakarta Barat, Asril Marzuki mengatakan demi kelancaran proyek tersebut sebanyak 99 bidang dari 130 bidang tanah di RW 03 telah dibebaskan. Sedangkan 41 bidang lainnya masih dalam tahap kelengkapan administrasi. Pihaknya masih meminta

kelengkapan sertifikat surat tanah dari warga. Setelah pembebasan lahan selesai, pelaksanaan pembangunan akan dijalankan.

"Sebelumnya ada 150 bidang tanah yang rencananya akan dibebaskan. Setelah disesuaikan dengan data Kepala Keluarga, hanya 130 bidang tanah yang

berhak dibebaskan," terangnya.

Asril meyakinkan jika pembebasan lahan selesai pada bulan Juni ini, maka proyek pembangunan jalan raya Joglo kemungkinan rampung akhir 2013 nanti. "Soal pembayaran tetap menunggu anggaran dari Pemprov. Makin cepat makin baik," ungkapnya. (asp)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

☐ Jan ☒ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

☐ Kompas ☐ Media Indonesia ☐ Koran Tempo ☐ Bisnis Indonesia
☐ Republika ☐ Sinar Harapan ☐ Suara Pembaruan ☐ Pikiran Rakyat
☐ Rakyat Merdeka ☒ Seputar Indonesia ☐ Investor Daily ☐ Kontan ☐ Lain-lain,
☐ Suara Karya ☐ Neraca ☐ Jurnal Nasional ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jembatan Penghubung 3 Kabupaten Rawan Longsor	- Usulan pembangunan bendungan ke Kementerian PU merupakan salah satu upaya pemeliharaan jembatan. Sementara pembangunannya nanti dipastikan tidak akan mengganggu rencana pembangunan Jembatan Cipamingkis II			Rp. 6 miliar	Pemkab Bekasi	

Jembatan Penghubung 3 Kabupaten Rawan Longsor

BEKASI—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun bendungan di Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah. Aliran sungai yang berkelok kembali menggerus penahan Jembatan Cipamingkis hingga mengakibatkan longsor.

Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengatakan, pembangunan bendungan diupayakan untuk menahan aliran air yang deras. Bila bendungan itu telah dibangun, Iman menjamin Jembatan Cipamingkis akan kokoh sekalipun ada terjangan air yang sangat deras.

“Kami sudah tinjau ke lokasi dan memang masalah utama Jembatan Cipamingkis adalah posisinya berada pada belokan air sungai Cipamingkis. Tanggul pun tidak kuat

menahan hantaman. Dikhawatirkan jembatan ini longsor dan terbawa arus dan mengancam keselamatan pengendara,” katanya.

Usulan pembangunan bendungan ke Kementerian PU, kata dia, merupakan salah satu upaya pemeliharaan jembatan. Sementara pembangunannya nanti dipastikan tidak akan mengganggu rencana pembangunan Jembatan Cipamingkis II yang menelan anggaran sebesar Rp6 miliar. “Pemeliharaan Jembatan Cipamingkis I tetap dilakukan, tidak akan dibiarkan. Jembatan itu masih sangat penting untuk akses masyarakat. Apalagi jembatan ini salah satu akses jalan penghubung ke Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang dari arah selatan Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja me-

ngakui kondisi Jembatan Cipamingkis memang sangat mengkhawatirkan karena kekuatan beton dan pembangunan turap hanya mampu bertahan sekitar dua tahun. Jembatan itu dikhawatirkan ambruk dan tertanam longsor.

“Untuk sementara diturap kembali. Setelah itu memang seharusnya dibangun bendung, mungkin kita akan minta bantuan dari pusat karena anggarannya besar dibutuhkan hingga puluhan miliar,” ucapnya kemarin. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarnomen menambahkan, pemeliharaan Jembatan Cipamingkis harus dilakukan secara berkesinambungan. Saat ini tanggul penahan yang longsor harus segera diperbaiki agar jembatan tidak roboh lagi. “Kami akan lihat lokasi, apakah layak atau tidak,” ungkapnya.

● **abdullah msurjaya**